



Seratus Gepeng dan Anjal Dirazia

# 80 Persen

# Berasal dari Luar Jogja

**UMBULHARJO** -- Tidak kurang dari 100 orang gelandangan dan pengemis (Gepeng) serta anak jalan (Anjal) tertangkap razia Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta sejak awal Ramadan. Jumlah gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Jogja memang meningkat drastis memasuki Bulan Puasa.

Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Wahyu Wi-dayat usai operasi di beberapa persimpangan di Jogja, Jumat (12/9), mengatakan selama Ramadan Dinas Ketertiban banyak melakukan pengamanan dan penertiban.

Menurutnya, Dinas Ketertiban mengadakan operasi setiap hari terhadap berbagai pelanggaran yang mengganggu ketertiban di Kota Jogja. Kegiatan operasi dimulai pagi hari hingga pukul 15.00, sedangkan malam sampai pukul 23.00.

"Kalau pagi sudah dioperasi bersih, malam ada pelanggaran lagi, itu bagiannya malam.

Malam sudah bersih, pagi ada pelanggaran, jadi bagiannya pagi. Dengan operasi yang terus-menerus seperti ini diharapkan akan memberi kesadaran, paling *nggak* di Bulan Ramadan. Harapannya bisa meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa yang seperti itu *nggak* boleh, termasuk gelandangan, pengemis, dan anak jalanan," ujarnya.

Wahyu mengemukakan, jumlah gelandangan, pengemis, dan anak jalanan meningkat drastis sejak awal Ramadan. Pada operasi kemarin, Petugas Dinas Ketertiban membawa paksa 20 orang gelandangan, pengemis, dan anak jalanan, sedangkan dalam beberapa kali operasi sebelumnya terdapat 80 orang, sehingga jumlah totalnya 100 orang dalam waktu hanya kurang dari dua minggu.

"Sebagian besar itu dari luar kota. Dan hampir 80 persen itu ada persoalan kultural 'tampaknya, budayanya memang nge-

mis. Jumlah itu naik hampir 100 persen dibandingkan sebelumnya. Di samping jumlahnya tambah, operasinya juga tambah sering dari yang tadinya dua kali seminggu menjadi hampir setiap hari," tuturnya.

Wahyu menegaskan, persoalan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Jogja tidak akan pernah selesai tanpa dukungan kabupaten atau kota lain dan provinsi. Setelah dioperasi dan dikirim ke panti sosial, mestinya mereka diverifikasi dan dikualifikasi untuk menentukan mana yang akan dibina, dikirim ke rumah sakit jiwa, dikirim ke provinsi, atau dipulangkan ke daerah asalnya. Jika mekanisme tersebut tidak didukung, persoalan tidak akan pernah tuntas.

"Semua perangkat memang sudah mendukung, tetapi realisasinya yang perlu ditingkatkan. Misalnya, kalau sarana panti *nggak* dilengkapi, bisa jadi sehari masuk, sehari kemudian sudah keluar," tandasnya. (fir)

**Dihaturkan Kepada Yth :**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005